
Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar

Anna Yulia Hartati

Staf Pengajar Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim Semarang
Jl Menoreh Tengah, Sampangan, Jawa Tengah
Email: anna_uwh@yahoo.co.id

Abstract

This article is trying to explain the roots of ethnic conflict in Myanmar, and what are the implications of the conflict. Ethnic conflict involves two ethnic groups are ethnic Rohingya Muslim and ethnic Buddha Rakhine. This conflict causes thousands of people trying to escape every year to Bangladesh, Malaysia and other places in the area. People try to escape because their rights are not given by the government Myanmar. The causes of ethnic conflict can be seen from three levels, which are Systemic level, which stated that the government's Myanmar had conspired with foreign investors, Domestic level who said that the government Myanmar led by a military junta, and perception level that stated if ethnic Rohingya is similar to the Benggali. This conflict leads to refugees on the large scale and humanitarian issues and invite the reaction of the international community and the UN.

Keywords: ethnic conflict, the junta, refugees

Abstrak

Tulisan ini mencoba menjelaskan akar konflik etnik di Myanmar, dan implikasi dari konflik tersebut. Konflik ini melibatkan dua kelompok etnik, yakni etnik Muslim Rohingya dan Etnik Buddha Rakhine. Konflik ini menyebabkan ribuan orang mencoba keluar ke Bangladesh, Malaysia dan area-area lain tiap tahunnya. Mereka mencoba keluar karena Pemerintah Myanmar tidak memberi hak-hak mereka. Penyebab konflik etnik bisa terlihat dari tiga tingkatan, yakni tingkatan sistemik yang menyatakan bahwa pemerintahan Myanmar berkonspirasi dengan investor asing, tingkatan domestik yang menyatakan bahwa pemerintahan Myanmar dipimpin oleh militer Junta, dan tingkatan persepsi yang menyatakan bahwa etnik Rohingya mirip dengan Benggali. Konflik ini menyebabkan pengungsian dalam skala besar dan isu-isu kemanusiaan juga mengundang reaksi dari masyarakat internasional dan PBB.

Kata Kunci: konflik etnis, junta, pengungsi

PENDAHULUAN

Konstelasi politik internasional tahun 2012 masih diwarnai dengan konflik etnis yang melanda beberapa negara. Yang sedang hangat dibicarakan dan menuai respon dari PBB serta banyak negara adalah konflik etnis yang terjadi di Myanmar, yaitu antara Etnis Rohingya (Muslim) dan Etnis Rakhine (Budha). Hingar bingar berita tentang Muslim Rohingya timbul menyusul konflik sektarian yang terjadi antara etnis Rohingya yang sebagian besar adalah Muslim dan etnis Rakhine yang mayoritas merupakan penganut Buddha.

Penyebab konflik itu sendiri tak begitu jelas. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa kerusuhan itu merupakan buntut peristiwa perampokan dan pemerkosaan terhadap perempuan Rakhine bernama Ma Thida Htwe pada 28 Mei 2012. Kepolisian Myanmar sebenarnya telah menahan dan memenjarakan 3 orang tersangka pelaku yang kebetulan dua di antaranya adalah etnis Rohingya. Namun, tindakan itu ternyata tak cukup mencegah terjadinya kerusuhan di negara bagian Rakhine yang

terletak di bagian barat Myanmar itu. Pada tanggal 4 Juni, terjadi penyerangan terhadap bus yang diduga ditumpangi pelaku pemerkosaan dan kerabatnya. Tercatat 10 orang Muslim Rohingya tewas. Sejak itu, kerusuhan rasial di Rakhine pun meluas.

Pemerintah Myanmar tak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya karena menganggap kelompok Muslim ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Hal itu ditegaskan kembali oleh Presiden Myanmar, Thein Sein, dalam *Al Jazeera*, 29 Juli 2012 bahwa Myanmar tak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang dianggap imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh itu.

Akar konflik yang lain adalah adanya kecemburuan terhadap etnis Rohingya. Populasi etnis Muslim Rohingya dalam beberapa dasawarsa ini terus meningkat. Tentu saja, hal ini menyebabkan kecurigaan dan kecemburuan pada etnis mayoritas Rakhine. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya pun sangat mungkin dianggap kerikil dalam sepatu, yakni sesuatu yang terus mengganggu. Keberadaan etnis Rohingya dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim ini.

Sejatinya Rohingya tidak tepat disebut “etnis” karena kata itu merupakan label politis yang digunakan untuk memperjuangkan keberadaan kelompok tersebut di Myanmar. Beberapa sejarawan Myanmar mengatakan bahwa nama Rohingya baru muncul pada tahun 1950-an, setelah kemerdekaan Myanmar. Dalam catatan PBB, Rohingya hanya disebut sebagai penduduk Muslim yang tinggal di Arakan, Rakhine, Myanmar.

Badan Pengungsi PBB (UNHCR) memperkirakan 800.000 Rohingya hidup di negara bagian Rakhine di sebuah pegunungan Myanmar yang berbatasan dengan Bangladesh. Ribuan orang mencoba untuk melarikan diri setiap tahun ke Bangladesh, Malaysia dan tempat lain di kawasan itu. Mereka mencoba melarikan diri karena hak-hak mereka yang ditindas karena kerja paksa dan penindasan. Artikel ini mencoba menjelaskan akar

konflik etnis di Myanmar dan apa dampak dari konflik tersebut.

METODOLOGI

KONFLIK ETNIS : KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk menjawab permasalahan terkait konflik etnis Myanmar, penulis menggunakan kerangka konseptual konflik etnis yang dikemukakan oleh Michael E. Brown. Pada beberapa konflik, skala kekerasan yang terjadi begitu besar, dan bahkan dapat disebut sebagai genosida. Banyak orang tertegun dengan keluasan maupun kedalaman konflik yang terjadi. Perang di Bosnia-Herzegovina pada 1999 menarik banyak perhatian dan simpati dari seluruh dunia. Beberapa konflik lainnya, seperti di Afghanistan, Angola, Armenia, Azerbaijan, Burma, Georgia, India, Indonesia, Liberia, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Bangladesh, Belgium, Bhutan, Burundi, Estonia, Ethiopia, Guatemala, Iraq, Latvia, Lebanon, Mali, Moldova, Niger, Irlandia Utara, Pakistan, Filipina, Romania, Rwanda, Afrika Selatan, Spanyol, dan Turki, juga memiliki skala massal yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

• Akar-akar Konflik Etnis

Di dalam tulisannya, Brown mengajukan tiga level analisis untuk memahami akar-akar penyebab konflik etnis. Level pertama adalah level sistemik. Level kedua adalah level domestik, dan level ketiga adalah level persepsi.

a. Level sistemik

Penyebab pertama terjadinya konflik etnis adalah lemahnya otoritas negara, baik nasional maupun internasional, untuk mencegah kelompok-kelompok etnis yang ada untuk saling berkonflik. Otoritas yang ada juga sangat lemah, sehingga tidak mampu menjamin keselamatan individu-individu yang ada di dalam kelompok tersebut.

Masalahnya adalah, sikap pertahanan diri suatu kelompok, yakni dengan memobilisasi tentara dan semua peralatan militer, bisa dianggap sebagai tindakan mengancam oleh kelompok lainnya. Pada akhirnya, hal ini akan memicu tindakan serupa dari kelompok lain, sekaligus meningkatkan ketegangan politis di antara

dua kelompok tersebut. Inilah yang disebut Brown sebagai dilema keamanan (*security dilemma*). Artinya, suatu kelompok seringkali tidak menyadari dampak dari tindakannya terhadap kelompok lainnya.

b. Level analisis Domestik

Level ini mengenai akar-akar penyebab konflik etnis berada di level domestik. Menurut Brown, level domestik ini terkait dengan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kehendak rakyatnya, pengaruh nasionalisme dan relasi antar kelompok etnis di dalam masyarakat, serta pengaruh dari proses demokratisasi dalam konteks relasi antar kelompok etnis. Setiap orang selalu mengharapkan agar pemerintahnya menyediakan keamanan dan stabilitas ekonomi. Kedua hal ini akan bermuara pada terciptanya kemakmuran ekonomi yang merata di dalam masyarakat. Apa yang disebut nasionalisme, menurut Brown, sebenarnya adalah “konsep yang menggambarkan kebutuhan untuk mendirikan suatu negara yang mampu mewujudkan tujuan-tujuan ini.”

Tuntutan ini akan semakin besar, ketika pemerintah yang berkuasa tidak mampu mewujudkan cita-cita tersebut. Di dalam masyarakat pasca pemerintahan rezim otoriter, pemerintah yang berkuasa sedang mengalami proses adaptasi, dan seringkali belum mampu mewujudkan kestabilan ekonomi maupun politik. Akibatnya, tingkat inflasi dan pengangguran meningkat tajam. Prospek perkembangan ekonomi pun suram. Dalam banyak kasus, kelompok etnis minoritas menjadi kambing hitam dari semua permasalahan ini. Mereka menjadi tumbal dari kekacauan yang terjadi.

Problem ini semakin rumit, ketika logika yang bergerak bukanlah lagi logika nasionalisme, melainkan logika fundamentalisme etnis. Begini, ketika pemerintah yang berkuasa sangatlah lemah, paham nasionalisme biasanya lebih didasarkan pada perbedaan etnis, dan bukan pada suatu pemikiran bahwa setiap orang yang hidup di suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Bahkan dapat pula dikatakan, bahwa proses demokratisasi secara langsung dapat menciptakan

suasana ketidakstabilan politis yang lebih besar, dan dengan demikian justru membuka peluang lebih besar bagi terjadinya konflik antar etnis. Proses demokratisasi justru meningkatkan intensitas konflik etnis yang telah terjadi.

c. Level Persepsi

Beberapa ahli berpendapat, bahwa penyebab terjadinya konflik etnis adalah, karena adanya pemahaman sejarah yang tidak tepat mengenai relasi antara dua atau lebih kelompok etnis. Sejarah yang mereka yakini bukanlah hasil dari penelitian yang punya dasar metodis dan obyektivitas, melainkan dari rumor, gosip, dan legenda, yang biasanya diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Cerita-cerita tersebut kemudian menjadi bagian dari adat istiadat. Dengan berlalunya waktu, cerita-cerita ini semakin jauh dari realitas, dan semakin banyak bagian yang dilebih-lebihkan. Di dalam cerita-cerita tersebut, kelompok etnis lain seringkali memperoleh cap buruk, sementara kelompok etnis sendiri memperoleh nama baik yang seringkali berbeda dengan realitasnya. Kelompok etnis lain dipandang sebagai suatu kelompok yang secara inheren jahat dan agresif. Anggota kelompok etnis setempat memandang pemahaman ini sebagai suatu bentuk kebijaksanaan leluhur yang diturunkan ke generasi mereka.

- **Dampak dari Konflik Etnis**

Ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi sebagai akibat dari pecahnya konflik etnis, yakni terjadinya rekonsiliasi secara damai, perpisahan etnis secara damai, dan perang saudara.

- **Rekonsiliasi Damai**

Dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok etnis yang terlibat dalam ketegangan politis dapat tetap bekerja sama dalam kerangka politik dan hukum tertentu. Dalam ketegangan tersebut justru biasanya, hak-hak minoritas dan hak-hak individual akan diangkat ke dalam perdebatan, dan memperoleh pemaknaan yang baru. Austria, Belgia, dan Swiss telah banyak membuat perjanjian politis yang menjamin bahwa etnis-etnis yang berada di negara tersebut tidak terlibat di dalam aksi

kekerasan, namun menempuh jalan dialog dan kompromi.

- **Perpisahan secara damai**

Pada kasus-kasus lain, kelompok-kelompok etnis yang saling bertentangan tidak dapat merumuskan suatu perjanjian yang mampu menampung kepentingan semua pihak. Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah dengan memutuskan hubungan legal dan politis yang sudah ada sebelumnya. Pada beberapa kasus, seperti pada pecahnya Uni Soviet dan pecahnya Czechoslovakia, perpisahan legal-politis ini dapat bermuara pada terjadinya pertumpahan darah, walaupun skalanya tidaklah besar. Walaupun begitu, perpisahan legal-politis ini biasanya hanyalah di tataran makro saja.

- **Perang Saudara**

Pada kasus-kasus lainnya, kelompok-kelompok etnis yang saling bertentangan tidak mampu membuat persetujuan bersama, baik dalam hal rekonsiliasi ataupun perpisahan legal politis secara damai. Banyak pertentangan antar etnis justru bermuara pada konflik yang melibatkan kekerasan pada skala yang masif. Tentu saja, motif-motif yang mengakibatkan terjadinya konflik ini beragam. Kelompok etnis minoritas bisa menuntut untuk membentuk negara mereka sendiri, atau menuntut otonomi politik dalam bentuk federal guna menentukan nasib mereka sendiri. Sebaliknya, kelompok etnis mayoritas biasanya hendak memperbesar kekuasaan mereka atas seluruh teritori, termasuk kekuasaan mereka atas kelompok minoritas.

SEJARAH ETNIS ROHINGYA

Kemunculan pemukiman Muslim di Arakan sebagai cikal bakal kelompok Rohingya terlacak sejak zaman Kerajaan Mrauk U, khususnya pada zaman Raja Naramaikhla (1430-1434). Setelah dibuang ke Bengal, Naramaikhla lalu menguasai kembali Mrauk U berkat bantuan Sultan Bengal. Seiring dengan berkuasanya Naramaikhla, masuk pula penduduk Muslim dari Bengal kewilayah Arakan, Rakhine. Dalam perkembangannya, jumlah pemukim Muslim dari

Bengal terus bertambah, terutama ketika Inggris menguasai Rakhine. Karena kurangnya populasi di Rakhine, Inggris memasukkan banyak orang Bengali ke Rakhine untuk bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, sampai saat ini pula, kebanyakan orang Rohingya bekerja di sektor agraris.

Dalam catatan PBB, Rohingya hanya disebut sebagai penduduk Muslim yang tinggal di Arakan, Rakhine, Myanmar. Dari sudut kebahasaan, bahasa yang diklaim sebagai bahasa Rohingya sebenarnya termasuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, khususnya kerabat bahasa Indo-Arya. Lebih detail lagi, bahasa Rohingya dikategorikan sebagai bahasa-bahasa Chittagonia yang dituturkan oleh masyarakat di bagian tenggara Bangladesh. Sementara itu, kebanyakan bahasa di Myanmar tergolong rumpun Tai Kadal, Austroasiatik, atau Sino-Tibetan. Jadi, jelas bahwa kelompok etnis Rohingya merupakan keturunan etnis Bengali, khususnya sub-etnis Chittagonia yang tinggal di Bangladesh tenggara.

Ketika Inggris melakukan sensus penduduk pada 1911, pemukim Muslim di Arakan sudah berjumlah 58 ribu orang. Jumlah itu terus bertambah pada tahun 1920-an ketika Inggris menutup perbatasan India, sehingga orang Bengali memilih masuk ke Rakhine. Sejak tahun-tahun ini pulalah mulai timbul konflik dengan penduduk lokal yang mayoritas merupakan penganut Buddha. Bertambahnya jumlah penduduk migrant membuat penduduk lokal khawatir.

Lalu, benarkah istilah Rohingya baru muncul pada tahun 1950-an? Sejarawan Jacques P. Leider mengatakan bahwa pada abad ke-18 ada catatan seorang Inggris yang bernama Francis Buchanan-Hamilton yang sudah menyebutkan adanya masyarakat Muslim di Arakan. Mereka menyebut diri mereka "Rooinga". Ada yang mengatakan bahwa istilah ini berasal dari kata "*rahma*" (rahmat) dalam bahasa Arab atau "*rogha*" (perdamaian) dalam bahasa Pashtun. Selain itu, ada pula yang mengaitkannya dengan wilayah Ruhadi Afghanistan yang dianggap sebagai tempat asal Rohingya.

Rohingya merupakan komunitas migrant dari Bangladesh yang sudah ratusan tahun tinggal di

Arakan, Rakhine, Myanmar. Sebagai komunitas yang sudah lama menetap di sebuah wilayah yang kebetulan kini menjadi bagian dari negara Myanmar, tentu saja sudah selayaknya mereka mendapatkan hak-hak dasar mereka, terutama status kewarganegaraan. Meskipun demikian, sikap pemerintah Myanmar sudah jelas seperti yang disampaikan Thein Sein bahwa Myanmar tak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya. Namun, Myanmar menawarkan solusi berupa pengiriman ribuan orang Rohingya ke negara lain atau tetap tinggal di Arakan, tetapi berada di bawah pengawasan PBB. Jadi, kelihatannya etnis Rohingya masih belum bisa bernapas lega sampai beberapa tahun mendatang.

SIKAP PEMERINTAH MYANMAR

Pujian masyarakat internasional pada reformasi Myanmar harus benar-benar dicermati. Pasalnya, gambar-gembar reformasi di negara yang sebelumnya disebut Burma itu ternyata belum berpengaruh secara signifikan bagi etnis minoritas Rohingya. Kelompok Muslim minoritas ini hingga saat ini tetap menjadi korban diskriminasi dan pemerasan di Myanmar. Diskriminasi pada warga Islam ini secara nyata terbukti dengan penolakan pemerintahan Presiden Thein Sein atas status etnis tersebut. Pemerintah Myanmar hingga kini belum mengakui etnis Rohingya sebagai warganya.

Pemerintah menganggap Rohingya sebagai migran ilegal dari Bangladesh. Badan Pengungsi PBB (UNHCR) memperkirakan 800.000 Rohingya hidup di negara bagian Rakhine di sebuah pegunungan Myanmar yang berbatasan dengan Bangladesh. Ribuan orang mencoba untuk melarikan diri setiap tahun ke Bangladesh, Malaysia dan tempat lain di kawasan itu. Mereka mencoba melarikan diri karena hak-hak mereka yang ditindas karena kerja paksa dan penindasan. Mereka ini tidak memiliki kewarganegaraan dan sangat rentan terhadap diskriminasi dan pemerasan.

Sentimen anti-Muslim di Myanmar telah berlangsung berabad-abad. Kulit etnis Rohingya yang lebih gelap membuat mereka mudah dikenali. Secara fisik dan budaya, mereka memang lebih mirip dengan orang-orang Benggali. Ketika Myanmar merdeka pada

1947, etnis Rohingya tidak diakui sebagai salah satu etnis di Myanmar. Kebanyakan mereka bermigrasi dari India semasa pemerintahan Kolonial Inggris. Selama PD II, etnis Rohingya pun setia kepada Inggris yang menjanjikan mereka negara muslim sediri. Karena itulah etnis Rohingya dianggap sebagai musuh Jendral Aung San, ayah Aung San Suu Kyi. Sampai sekarang, etnis Rohingya tidak mempunyai kartu identitas yang sah. Mereka tidak dapat membeli tanah atau rumah dan tempat tinggal mereka dapat diambil alih setiap saat. Pemerintah Myanmar menganggap Rohingya sebagai warga asing, sementara banyak warga lainnya menganggap mereka sebagai imigran gelap.

Pemerintah Myanmar memang terkesan mendiamkan masalah ini. Rezim yang berkuasa di Myanmar justru diuntungkan dengan konflik yang melibatkan etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar menuding ada kelompok atau individu memainkan konflik di Arakan/Rakhine. Menurut Jurnalis Swedia, Bertil Lintner penduduk di Arakan/Rakhine, termasuk etnis Rohingya, sebenarnya menuntut kemerdekaan sendiri sejak 1948. Pemerintah Myanmar telah mendapatkan keuntungan dari kerusuhan di Rakhine itu. Pada pemilihan November 2010, Partai Nasionalis Rakhine, sebuah partai local, meraih kemenangan dan mengalahkan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP). Sekarang, setelah kekerasan atas Rohingya terjadi, warga Buddha Rakhine berbalik menyambut pemerintah. Mereka banyak menyebut Presiden Thein Sein dengan sapaan *thamadagyi* atau "presiden besar". Tak hanya itu, pasukan militer mendadak populer di sana dan pemerintah diberi peluang untuk mengangkatsentimen antimuslim di seluruh negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KONFLIK ETNIS ROHINGYA DAN ETNIS RAKHINE

Konflik yang melibatkan dua etnis ini tidak bisa dilepaskan dari faktor sejarah. Kata Rohingya berasal dari kata Rohang, yang merupakan nama lama dari negara bagian Arakan. Arakan dulunya merupakan sebuah negara independen yang pernah dikuasai secara bergantian oleh orang Hindu, Budha dan Muslim.

Pada 1203 M, Bengali menjadi sebuah negara Islam, dan sejak saat itu pula pengaruh Islam mulai merambah masuk ke wilayah Arakan. Hingga pada akhirnya pada 1430 M, Arakan menjadi sebuah negara Muslim yang ditandai dengan diratifikasinya Perjanjian Yandabo menyebabkan Burma, Arakan dan Tenasserim dimasukkan ke wilayah British-India. Selama 350 tahun kerajaan Muslim berdiri di Arakan dan Umat Islam hidup dengan tenang. Namun pada 24 September 1784 M. Raja Boddaw Paya dari Burma menginvasi Arakan dan menguasainya. Pada 1824-1826 perang Anglo-Burma pertama pecah. Perang ini berakhir pada 24 Februari 1826.

Tahun 1935 diputuskan bahwa Burma terpisah dari British-India tepatnya mulai tanggal 1 April 1937 melalui keputusan ini pula digabungkanlah Arakan menjadi bagian British-Burma. Hal ini bertentangan dengan keinginan mayoritas penduduknya yang beragama Islam dan ingin bergabung dengan India. Hingga pada akhirnya Arakan menjadi bagian Burma yang merdeka pada Tahun 1948.

Tidak seperti etnis lain yang setidaknya diakui warganegarannya oleh Myanmar, masyarakat Rohingya dianggap sebagai penduduk sementara. Sebagai “orang asing”, masyarakat Rohingya tidak diperbolehkan bekerja sebagai pengajar, perawat, abdi masyarakat atau dalam layanan masyarakat Mereka, dianggap sebagai orang-orang yang tak bernegara dan tidak diakui oleh pemerintah Myanmar.

Etnis yang terletak di Myanmar Utara ini terpinggirkan oleh pemerintahan junta militer dan di wilayah Rohingya, para pengajarnya biasanya berasal dari golongan etnis Budha Rakhine, yang seringkali menghalangi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat Rohingya. Pemerkosaan dan kerja paksa adalah hal yang cukup lazim bagi etnis Rohingya di Myanmar. Tentara Myanmar kerap kali meminta uang dari mereka dan ketika mereka tidak dapat membayar, mereka akan ditahan dan disiksa. Masyarakat Rohingya juga mengalami penyiksaan secara religi. Hampir seluruh masyarakat Rohingya adalah beragama Islam. Dalam tiga tahun terakhir, setidaknya 12 Masjid di Arakan Utara dihancurkan,

dengan jumlah terbesar di tahun 2006. Sejak 1962, tidak ada Masjid baru yang dibangun. Bahkan para pemimpin agama telah dipenjara karena merenovasi Masjid.

Seorang pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sering bertugas ke daerah-daerah krisis kemanusiaan Perlakuan rezim Burma terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya, disebut-sebut “seburuk-buruk perlakuan terhadap kemerdekaan manusia”. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Valerie Amos, menyatakan bahwa Rohingya dipandang sebagai salah satu komunitas paling tertindas di dunia.

AKAR PENYEBAB KONFLIK

Laporan *Amnesty International*, pada bulan Juli 2012, ada tindak kekerasan, pembunuhan, dan pemerkosaan, oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap warga Rohingya yang beragama Islam di wilayah Rakhine, perbatasan Bangladesh - Myanmar. Akibatnya 53.000 Muslim Rohingya mengungsi mencari tempat aman. Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwi mengatakan bahwa pemerintah Myanmar menerapkan tindakan maksimal untuk menghentikan kekerasan antar etnis di Rakhine.

Dan semuanya itu, digunakan sebagai sentimen pertikaian antar agama, karena paling mudah di angkat secara politik dan ke kancah Internasional. Untuk memperjelas akar penyebab konflik, penulis memilah akar konflik menjadi tiga bagian seperti dibawah ini.

- **Penyebab dari level Sistemik**

Penyebab konflik dalam level ini bisa dijelaskan penyebab pertama terjadinya konflik etnis adalah lemahnya otoritas negara, baik nasional maupun internasional, untuk mencegah kelompok-kelompok etnis yang ada untuk saling berkonflik. Menurut R.J May, negara lemah dengan legitimasi kinerja yang lemah (terutama ditandai oleh Korupsi, Nepotisme dan salah urus) mudah dijangkiti konflik intern, dan dalam hal masyarakat terpecah-pecah di sepanjang garis suku atau daerah, gerakan-gerakan kesukuan dan separatisme merupakan ancaman yang terus menerus ada pada keamanan negara. Negara seluas 680 ribu

km² ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangoon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November [HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/2005"](http://id.wikipedia.org/wiki/2005)2005.

Pada 1988, terjadi gelombang demonstrasi besar menentang pemerintahan junta militer. Gelombang demonstrasi ini berakhir dengan tindak kekerasan yang dilakukan tentara terhadap para demonstran. Lebih dari 3000 orang terbunuh. Pada pemilu 1990 partai pro-demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi 82 persen suara namun hasil pemilu ini tidak diakui rezim militer yang berkuasa.

Kekacauan politik berlanjut dengan adanya gelombang protes yang cukup besar dari kalangan Biksu pada tahun 2007. Protes dimotori oleh para biksu budha di Myanmar. Pada awalnya para biksu menolak sumbangan makanan dari para jendral penguasa dan keluarganya, penolakan ini menjadi simbol bahwa para biksu tidak lagi mau merestui kelakuan para penguasa militer Myanmar. Aksi demo juga dipicu oleh naiknya harga BBM beberapa ratus persen akibat dicabutnya subsidi.

Demo melibatkan ribuan bikshu kemudian meletus diberbagai kota di Myanmar, para warga sipil akhirnya juga banyak yang mengikuti. Pemerintah Junta Militer melakukan aksi kekerasan dalam membubarkan demo-demo besar ini, Pagoda-pagoda disegel, para demonstran ditahan, dan senjata digunakan untuk membubarkan massa. Banyak biksu ditahan, beberapa diyakini disiksa dan meninggal dunia. Sepanjang Gelombang protes terjadi belasan orang diyakini menjadi korban, termasuk seorang reporter berkebangsaan Jepang, Kenji Nagai, yang ditembak oleh tentara dari jarak dekat saat meliput demonstrasi. Kematian warga Jepang ini memicu protes Jepang pada Myanmar dan mengakibatkan dicabutnya beberapa bantuan Jepang kepada Myanmar.

Ternyata kekerasan di Myanmar terhadap suku minoritas itu terjadi sebelum demonstrasi dan

pembebasan Aung San Suu Kyi. Peristiwa di Rakhine ini menunjukkan bahwa penganiayaan tersebut justru disponsori oleh negara. Seperti dilansir oleh AFP, Lembaga Hak Asasi Manusia di New York, Amerika Serikat, menemukan, pemerintah Myanmar justru mendukung kampanye terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan kepada Rohingya.

Menurut Stewart Davies, juru bicara Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA PBB) di Burma, Presiden Thein Sein mengatakan, Burma perlu menyelesaikan isu kewarganegaraan itu dengan cara yang positif dan memasukkan semua unsur masyarakat.

Akar penyebab konflik bisa berasal dari pihak luar yang memang sengaja untuk ikut terlibat didalam konflik tersebut. Menurut Direktur Eksekutif Global Future Institute, Jakarta, yang terjadi di Arakan ini bukan hanya *Muslim Cleansing*, tapi juga *Budha Cleansing*. Menurut pengamat internasional ini, yang menjadi korban bukan hanya masyarakat muslim maupun Budha, tapi juga terjadi benturan peradaban di Myanmar. Ada permainan korporasi tertentu yang berkolaborasi dengan Junta militer Myanmar. Pemicunya mirip dengan Ambon, sebuah masalah kriminal yang kemudian dipolitisasi. Untuk itu harus dipahami skema besarnya. Yang sesungguhnya terjadi adalah Cleansing masyarakat.

Dari data yang ada, pada tahun 1988, muncul sistem baru di Myanmar. Walaupun rezim otoriter militer yang memimpin, tapi Myanmar menggunakan sistem pasar. Ketika itu ada undang-undang baru yang namanya *The Union of Myanmar Foreign Investment Law*. Payung hukum ini adalah perlindungan terhadap sektor eksplorasi dan pengembangan sektor minyak dan gas alam yang melibatkan korporasi-korporasi asing. Pada kasus Arakan ini adalah pertarungan soal minyak dan gas bumi.

Pada tahun 2005, perusahaan gas Cina menandatangani kontrak gas dengan pemerintah Myanmar untuk mengelola eksplorasi minyak. eksplorasi minyak dan gas bumi itu menjadi incaran bukan hanya Cina tapi juga AS. Apalagi Chevron leading bermain di situ, ada juga Petro China,

Tiongkok Petroleum, Petronas Malaysia dan lain. Repotnya rezim militer ini memproteksi lewat undang-undang *The Union of Myanmar Foreign Investment Law*. Cina dan beberapa negara yang diluar AS dan Eropa Barat melihatannya lebih unggul. Sementara AS ketinggalan.

Masalah Muslim di Arakan ini menarik karena cenderung memberi ruang bagi pendekatan symmetric Bill Clinton yang diterapkan oleh Obama dan Hillary Clinton. Dengan dasar, "Konflik wilayah itu perlu advokasi hak asasi manusia yaitu LSM, jadi LSM perlu masuk." Dari pintu ini, mereka masuk dengan memakai konflik Islam dan Budha tersebut. Tapi tampak sasaran strategisnya adalah sama yaitu penguasaan minyak dan gas bumi. Yang disayangkan dalam rezim militer mulai dari Ne Win sampai sekarang ini yang seakan-akan sosialis negara justru pada dasarnya kapitalis negara. Sejatinnya, dengan undang-undang *The Union of Myanmar Foreign Investment Law*, Myanmar pada dasarnya sedang mengarah pada pasar, tapi di bawah kendali penuh negara. Dan dia memproteksi korporasi-korporasi untuk berkolaborasi dengan penguasa. Tentu dengan segala bayaran sosialnya.

• Penyebab dari level Domestik

Menurut Brown, level domestik ini terkait dengan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kehendak rakyatnya, pengaruh nasionalisme dan relasi antar kelompok etnis di dalam masyarakat, serta pengaruh dari proses demokratisasi dalam konteks relasi antar kelompok etnis.

Menurut catatan sejarah, penderitaan etnis Rohingya dimulai sejak tahun 1978. Yaitu, ketika ada 300 ribu jiwa etnis Rohingya yang dipaksa mengungsi dari negerinya ke Bangladesh dan terlunta bertahun-tahun. Sejak 1991-1992, terjadi eksodus gelombang berikutnya. Tak hanya ke Bangladesh, gelombang eksodus juga terjadi ke negara Asean lainnya.

Mayoritas, sekitar 53 juta, penduduk Myanmar beragama Budha, dan sisanya adalah minoritas Kristen (2,9 juta), Muslim (2,27 juta), dan sekitar 300 ribu Hindu. Tetapi, Muslim Rohingya secara berulang

diperlakukan sewenang-wenang selama sejarah Burma. Para pengamat menganggap pembunuhan itu telah berlangsung secara sistematis dan dilembagakan sepanjang sejarah Burma. Muslim Rohingya yang terdiri dari berbagai etnis, India, Banglades, Cina, Arab, Persia dan Burma sendiri, tampaknya selama ini dianggap punya 'dosa besar', yakni karena mereka adalah pekerja keras, sehingga banyak yang berhasil dalam perdagangan dan di dunia pendidikan.

Diskriminasi yang paling kentara adalah bahwa, pemerintah Myanmar hingga hari ini menolak mengakui kewarganegaraan Muslim Rohingya dan mengklasifikasikan mereka sebagai imigran ilegal, meskipun mereka telah tinggal di negeri itu selama beberapa generasi. Lembaga Hak Asasi Manusia PBB mendesak Myanmar untuk menghentikan kekerasan sekte di Rakhine. PBB meminta pemerintah Myanmar agar tidak menggunakan konflik sebagai alasan mengeluarkan minoritas Muslim Rohingya dari negara mereka. Permasalahan etnis Rohingya sering menjadi sorotan media internasional mulai dari pengungsian besar-besaran ke Bangladesh hingga insiden tenggelamnya kapal pengangkut pengungsi yang melibatkan angkatan laut Thailand.

Ketika Myanmar merdeka pada 1947, etnis Rohingya tidak diakui sebagai salah satu etnis di Myanmar. Kebanyakan mereka bermigrasi dari India semasa pemerintahan Kolonial Inggris. Selama PD II, etnis Rohingya pun setia kepada Inggris yang menjanjikan mereka negara muslim sendiri. Karena itulah etnis Rohingya dianggap sebagai musuh Jendral Aung San, ayah Aung San Suu Kyi. Hingga kini, etnis Rohingya tidak mempunyai kartu identitas yang sah. Mereka tidak dapat membeli tanah atau rumah dan tempat tinggal mereka dapat diambil alih setiap saat. Pemerintah Myanmar menganggap Rohingya sebagai warga asing, sementara banyak warga lainnya menganggap mereka sebagai imigran gelap.

Di tengah munculnya gelombang demokratisasi, Myanmar menghadapi tantangan yang besar. Lewat rezim militer pimpinan Jenderal Than Swee, di satu sisi kehidupan politik Myanmar memang kuat terutama soal keamanan, tapi di sisi lain seperti

mekanisme berkenegaraan jelas menjadi tak sehat, otoritarianisme menyeruak, dan rakyat ditebari teror-teror penculikan, penahanan, dan bahkan pembunuhan.

- **Penyebab dari level Persepsi**

Adanya pemahaman sejarah yang tidak tepat mengenai relasi antara dua atau lebih kelompok etnis. Sejarah yang mereka yakini bukanlah hasil dari penelitian yang punya dasar metodis dan obyektivitas, melainkan dari rumor, gosip, dan legenda, yang biasanya diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Kelompok etnis lain dipandang sebagai suatu kelompok yang secara inheren jahat dan agresif. Anggota kelompok etnis setempat memandang pemahaman ini sebagai suatu bentuk kebijaksanaan leluhur yang diturunkan ke generasi mereka. Tidaklah mengherankan, bahwa cerita-cerita adat istiadat melibatkan suatu pertarungan wacana yang merupakan cerminan dari pandangan kelompok yang satu kepada kelompok lainnya. Berbagai bentrokan yang terjadi antara kedua etnis menggambarkan betapa persepsi mereka tentang etnis yang dimilikinya berbeda.

Isu kewarganegaraan bagi etnis Rohingya merupakan isu peka di Myanmar, di mana kebanyakan orang dan pemerintah lebih cenderung menyebut mereka sebagai etnis Bengali. Istilah itu merujuk kepada pandangan yang menganggap mereka sebagai migran gelap dari Bangladesh, meskipun kenyataan, banyak di antara mereka telah tinggal di Myanmar secara turun temurun.

Sentimen anti-Muslim di Myanmar juga telah berlangsung berabad-abad. Kulit etnis Rohingya yang lebih gelap membuat mereka mudah dikenali. Secara fisik dan budaya, mereka memang lebih mirip dengan orang-orang Benggali. Sehingga persepsi tentang etnis Rohingya akan terus melekat di benak pemerintah dan etnik Budha Rakhine. Ada perselisihan paham sedikit saja akan memicu konflik yang besar.

DAMPAK KONFLIK ETNIS

Menurut Brown, setidaknya, ada tiga kemungkinan

yang bisa terjadi sebagai akibat dari pecahnya konflik etnis, yakni terjadinya rekonsiliasi secara damai, perpisahan etnis secara damai, dan perang saudara. Tampaknya dampak konflik etnis di Myanmar ini kemungkinan di opsi pertama yaitu terjadinya rekonsiliasi secara damai. Hal ini bisa dilihat ada indikasi itikad baik dari pemerintah Myanmar untuk mempertimbangkan hak-hak Rohingya.

Presiden Myanmar Thein Sein menjanjikan untuk memperhatikan hak-hak baru yang bisa didapatkan oleh warga etnis minoritas Rohingya. Tetapi Presiden Thein ragu untuk memberikan kewarganegaraan secara penuh untuk etnis Rohingya yang selama ini terdiskriminasi.

Keinginan Presiden Thein ini ditegaskannya dalam sebuah surat yang ia kirim kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tetapi Thein tidak memberikan janji, meskipun isi surat tersebut membuahkan peluang menjelang kedatangan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama. Isi surat Thein Sein, seperti dikutip *Associated Press*, Sabtu (17/11/2012), menyatakan bahwa "Pemerintahan kami telah mempersiapkan pertimbangan baru untuk isu yang tengah diperdebatkan saat ini. Termasuk, kewarganegaraan, izin kerja dan kebebasan untuk Rohingya".

Setidaknya ada secercah harapan untuk segera mengakhiri konflik yang sudah berlangsung lama. Sayangnya, Thein belum mau memberikan kewarganegaraan penuh bagi etnis Rohingya. Padahal selama ini, etnis minoritas yang beragama Islam tersebut, kerap mendapatkan diskriminasi dari rakyat dan Pemerintah Myanmar. Meski sudah tinggal di Myanmar selama ratusan tahun, Rohingnya tetap dianggap warga tersingkirkan.

Pada tanggal 8 Nopember 2012 yang lalu, pemerintah Myanmar, menggelar operasi kependudukan untuk memverifikasi kewarganegaraan umat Muslim yang berada di Barat negara bagian Rakhine, yang terkoyak akibat konflik antara masyarakat Buddha dan Muslim, sejak bulan Juni 2012 lalu. Menurut Jurubicara Pemerintah negara bagian Rakhine, Myaing Win operasi kependudukan dimulai dikotapraja Pauktaw. Nantinya operasi ini akan

dilakukan diseluruh negara bagian Rakhine. Namun belum diketahui maksud dari kegiatan tersebut, apakah nantinya Pemerintah Myanmar akan memberikan status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya yang belum mendapatkannya. Sejumlah wartawan di Myanmar, memastikan proses verifikasi berlangsung dengan baik, bahkan di wilayah terpencil seperti di pulau SinMaw. Para petugas sensus terlihat telaten medatangi rumah para warga Rohingya, dan mendata mereka satu persatu. Semoga ini menjadi langkah awal yang baik bagi keberadaan dan eksistensi Etnis Rohingya di tengah ketidakpastian yang dialaminya.

KESIMPULAN

Akar penyebab konflik etnis di Myanmar bisa dilihat dari tiga level yaitu : (a). Level sistemik, dimana pemerintah Myanmar tidak mengakui status kewarganegaraan etnis muslim Rohingya, walaupun mereka sudah hidup secara turun temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Akibatnya Etnis Rohingya dianggap sebagai penduduk ilegal tanpa status. Selain masalah pengakuan tersebut, ada konspirasi antara pemerintah Junta dengan pihak korporasi asing yang akan mengeksplorasi minyak dan gas bumi. Korporasi tersebut dari AS, China, dan lain-lain. Ada kesan konflik tersebut sengaja dibiarkan agar kepentingan pemerintah bisa terwujud. (b). Level Domestik, ditengah gelombang demokratisasi yang mengemuka, Myanmar dihadapkan pada tantangan yang cukup besar. Adanya kepemimpinan Militer disatu sisi keamanan negara terjamin, tetapi tapi di sisi lain seperti mekanisme berkenegaraan jelas menjadi tak sehat, otoritarianisme menyeruat, dan rakyat ditebari teror-teror penculikan, penahanan, dan bahkan pembunuhan. Pemerintah Junta militer pada kenyataannya tidak mampu meredam konflik antara kedua etnis tersebut, sehingga cenderung berlarut-larut bahkan dalam waktu yang dekat konflik terjadi lagi yang menimbulkan gelombang pengungsi besar-besaran. (c). Level Persepsi, muncul sentimen anti-Muslim di Myanmar telah berlangsung berabad-abad. Diskriminasi pada warga Islam ini secara nyata terbukti

dengan penolakan pemerintahan Presiden Thein Sein atas status etnis tersebut. Pemerintah Myanmar hingga kini belum mengakui etnis Rohingya sebagai warganya. Kulit etnis Rohingya yang lebih gelap membuat mereka mudah dikenali. Secara fisik dan budaya, mereka memang lebih mirip dengan orang-orang Benggali.

Tampaknya konflik etnis di Myanmar akan mengarah ke Rekonsiliasi damai. Adanya indikasi itikad baik dari pemerintah untuk melakukan pendataan ulang terhadap warga Rohingya menjadi awal yang baik terbukanya jalan damai. Walaupun keraguan pemerintah masih terlihat dalam hal pemberian status kewarganegaraan Rohingya, setidaknya pemerintah sudah membuka diri untuk mencari solusi bagi konflik yang melanda negaranya.

REFERENSI

- Brown E. Michael., "Causes and Implications of Ethnic Conflict", dalam *The Ethnicity Reader. Nationalism, Multiculturalism, and Migration*, Guibernau dan John Rex (eds), Great Britain, Polity Press, 1997
- Cady, Frank John, *A History of Modern Burma*, Cornell University Press, Michigan, 2008
- Lintner, Bertil, *Burma in Revolt: Opium and Insurgency since 1948*, Wesiview Press, California, 1994
- May. R.J., dalam Dewi Fortuna Anwar, dkk, *Konflik Kekerasan Internal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005
- Smith, John Martin, *Burma: insurgency and the politics of ethnicity Politics in Contemporary Asia*, Zed book, Michigan, 1991
- Natsir . Moh., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- <http://jaringnews.com/internasional/asia/25719/kasus-rohingya-lebih-buruk-dari-apartheid-afrika-selatan-pada—an>, diakses 01 Nopember 2012, pukul 21.00 Wib.
- <http://www.voaindonesia.com/content/pejabat-pbb-bahas-isu-kewarganegaraan-etnis-rohingya-di-burma/1560024.html>, diakses 07 Desember 2012, pukul 14.00 Wib.
- <http://luar-negeri.kompasiana.com/2012/07/31/sikap-resmi-pemerintah-myanmar-tentang-pembataian-di-rakhine-481474.html>, diakses 10 Oktober 2012, pukul 03.00 Wib
- "Administrative divisions". *The World Factbook*. Central Intelligence Agency. 29 Juni 2012, diakses 2 Nopember 2012, pukul 03.00 Wib
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar>, diakses 02 Nopember 2012, pukul 03.00 Wib
- <http://news.liputan6.com/read/426542/tentara-myanmar-tembaki-etnis-rohingya>, diakses 02 Nopember 2012, pukul 3.00 Wib
- <http://www.voaindonesia.com/content/pejabat-pbb-bahas-isu-kewarganegaraan-etnis-rohingya-di-burma/1560024.html>, diakses 02 Nopember 2012, pukul 04.00 Wib
- http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=idHYPERLINK "http://www.theglobal-review.com/"

content_detail.php?lang=id&id=10134&type=105"&HYPERLINK
"http://www.theglobal-review.com/
content_detail.php?lang=id&id=10134&type=105" id=10134 HYPERLINK
"http://www.theglobal-review.com/
content_detail.php?lang=id&id=10134&type=105"&HYPERLINK
"http://www.theglobal-review.com/
content_detail.php?lang=id&id=10134&type=105" type=105# UL2XWfVzMw,
diakses 10 Nopember 2012, pukul 04.00 Wib

Wawancara khusus Agenda Tersembunyi Tragedi Rohingya Myanmar

http://www.theglobalreview.com/
content_detail.php?lang=id HYPERLINK "http://
www.theglobalreview.com/
content_detail.php?lang=id&id=8937&type=13"&HYPERLINK
"http://www.theglobalreview.com/
content_detail.php?lang=id&id=8937&type=13" id=8937 HYPERLINK
"http://www.theglobalreview.com/
content_detail.php?lang=id&id=8937&type=13"&HYPERLINK
"http://www.theglobalreview.com/
content_detail.php?lang=id&id=8937&type=13" type=13# UL2ZNmfVzMw),
Diakses 10 Nopember 2012, pukul 04.00 Wib

http://www.theglobalreview.com/
content_detail.php?lang=id HYPERLINK "http://
www.theglobalreview.com/
content_detail.php?lang=id&id=10134&type=105"&HYPERLINK
"http://www.theglobalreview.com/
content_detail.php?lang=id&id=10134&type=105" id=10134 HYPERLINK
"http://www.theglobalreview.com/
content_detail.php?lang=id&id=10134&type=105"&HYPERLINK
"http://www.theglobalreview.com/
content_detail.php?lang=id&id=10134&type=105" type=105# UL2XWfVzMw,
Diakses 10 Nopember 2012, pukul 03.00 Wib.

http://internasional.kompas.com/read/2012/11/17/18535480/
Myanmar.Pertimbangan.Hak.Etnis.Rohingya, diakses 02 Nopember
2012, pukul 04.00 Wib

http://international.okezone.com/read/2012/12/07/411/728940/
myanmar-larang-siaran-dokumentasi-rohingya, diakses 08 Oktober
2012, pukul 03.00 Wib

http://international.okezone.com/read/2012/11/17/411/719476/
presiden-myanmar-pertimbangan-hak-rohingya, diakses 18
Nopember 2012, pukul 14.00 Wib

http://www.tribunnews.com/2012/11/30/etnis-rohingya-disensus-
pemerintah-myanmar, diakses 10 Nopember 2012, pukul 05.00
Wib

http://mizan.com/news_det/mengenal-etnis-rohingya-dari-sudut-
pandang-sejarah.html, Diakses 12 Nopember 2012, pukul 03.00
wib

http://www.tempo.co/read/news/2012/11/12/118441312/Kekerasan-
Atas-Rohingya-Untungkan-Rezim-Myanmar, diakses 02 Desember
2012, pukul 03.00 Wib